

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen (Mabruri dan Winarna, 2010). Tujuan utama lembaga inspektorat adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan salah satu agenda utama reformasi sektor publik di Indonesia. Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005 dalam Bolang dkk 2013).

Queena dan Rohman (2012) menyatakan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparat pemerintah yang melaksanakannya. Maka, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Bedard (1986) dalam Agusti dan Pertiwi (2013) menyatakan juga dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli bidang akuntansi dan auditing. Kompetensi ditunjukkan pula dengan keharusan bagi setiap auditor, untuk memiliki keterampilan atau kemahiran profesi auditor yang diakui umum untuk melakukan audit, karena itu secara profesi tidak semua orang boleh melakukan audit (BPKP, 2009) dalam Ramadhanis (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Lehman dan Norman (2006) dalam Queena dan Rohman (2012) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman (*expertise*), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgment.

Septianingtyas dkk (2013) menyatakan seorang auditor dalam memeriksa laporan keuangan juga harus memiliki independensi yang tinggi. Independensi merupakan sikap netral tidak memihak. Adapun definisi independensi (Boynton, 2003) dalam Septianingtyas dkk (2009) adalah dasar dari profesi auditing dimana auditor akan bersikap netral dan objektif terhadap

entitas. Menurut Arens (2008) dalam Serlinda dkk (2009), independensi berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya dan membuat laporan audit.

Pemilihan studi empiris ini menggunakan berbagai pertimbangan, karena banyaknya opini masyarakat tentang bagaimana kualitas audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan melihat fenomena rendahnya kualitas hasil audit yang dihasilkan oleh auditor yang disebabkan karena ketidakpatuhan auditor terhadap standar audit yang berlaku. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Marietta dkk (2013) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Sulawesi Utara Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah”. Tetapi ada perbedaan dari penelitian terdahulu yang menggunakan sampel seluruh aparat Inspektorat Surakarta dan Jogjakarta. Pentingnya didalam penelitian ini memberikan informasi mengenai pengaruh kompetensi, indpenedensi, dan pengalaman terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan pengeolaan keuangan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemegang kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui ulang tentang masalah tersebut, sehingga mereplikasi judul yang sama tetapi beda populasi penelitian yaitu “PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT

INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA DAN JOGJAKARTA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Surakarta dan Jogjakarta dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah ?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Surakarta dan Jogjakarta dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah ?
3. Apakah terdapat pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Surakarta dan Jogjakarta dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Surakarta dan Jogjakarta dalam pengawasan

pengelolaan keuangan daerah, baik secara bersama-sama maupun terpisah.

2. Untuk menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Surakarta dan Jogjakarta dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, baik secara bersama-sama maupun terpisah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Surakarta dan Jogjakarta dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, baik secara bersama-sama maupun terpisah.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan oleh para pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat.
2. Sebagai masukan bagi Inspektorat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam meningkatkan kinerjanya sebagai internal auditor/aparat pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam Akuntansi Sektor Publik khususnya dalam hal pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
4. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini. Maka penulis membaginya ke dalam 5 bab sebagai berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, dan metode analisis

data (mencangkup statistik deskriptif data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis).

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan proses penganalisaan data yang meliputi prosedur penentuan sampel penelitian, analisis data, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan pembahasan. Dalam bab ini juga dijelaskan dan dibandingkan pula hasil yang diperoleh dari penelitian yang sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.